



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

KEHIDUPAN POLITIK DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA
PADA MASA REPUBLIK BATAAF (1800-1811)

SKRIPSI

Tidak Dipinjamkan Ke luar



Oleh :

Sri Arini

NIM : 9102105101

Asal : Madich - Pambelian

Terima : Tgl

Induk : PTL 96-1827

PT 1

KLASS

959.82

SR1

llp

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
1996

MOTTO :

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri" (Hasbi. Ashshiddiq, 1971, "QS.Ar-Ra'ddu (11)", Al-Qur'an dan terjemahan, hal:37, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Mohammad Ikhsan dan Ibu Diami yang tercinta ;
2. Kakak-kakakku Enik Lestari, Purwanto, Dwi Mawardi yang tersayang ;
3. Sahputra Jaya yang tersayang ;
4. Guru-guruku yang terhormat ;
5. Alma mater yang selalu kubanggakan.

KEHIDUPAN POLITIK DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA
PADA MASA REPUBLIK RATAAF (1800-1811)

SKRIPSI

Diajukan Untuk dipertahankan di Depan Tim Penguji Guna memenuhi salah satu syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh

Nama : Sri Arini
NIM : 9102105101
Jurusan : Pend. IPS
Program : Pend. Sejarah
Angkatan : 1991
Daerah Asal : Jember
Tempat/ tanggal lahir : Jember, 13 November 1972

Disetujui Oleh:

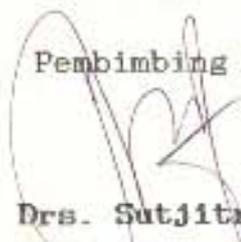
Pembimbing I,



Dra. Sri Handayani

NIP. 131 472 786

Pembimbing II,



Drs. Sutjitro

NIP. 131 577 287

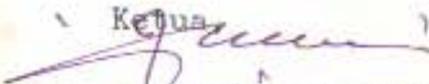
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai Skripsi

Pada hari : Rabu

Tanggal : 30 Oktober 1996

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Imam Muchtar, S.H
NIP.130 810 936

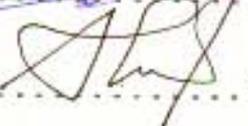
Sekretaris,

Drs. Sujitro
NIP.131 577 287

Anggota :

1. Dra. Sri Handayani
NIP.131 472 786
2. Drs. Choesnoel Hadi
NIP.130 145 576
3. Drs. Dwi Suparno
NIP.131 274 727


(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui

Dekan,


Drs. Soedarwoto

NIP. 130 325 914

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Republik Bataaf (1800-1811)" ini dengan selamat.

Selain itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Jember ;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
3. Kepala Pusat Penelitian Universitas Jember ;
4. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Jember ;
5. Ketua Jurusan IPS ;
6. Ketua Program Pendidikan Sejarah ;
7. Pembimbing I dan II ;
8. Dosen Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Penulisan skripsi ini. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Jember, 30 Oktober 1986

RINGKASAN

Sri Arini. Oktober 1996. Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Republik Bataaf (1800-1811)

Skripsi Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, FKIP Universitas Jember.

Pembimbing I Dra. Sri Handayani

Pembimbing II Drs. Sutjitro

Kata kunci : Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa, Republik Bataaf.

Berkaitan dengan judul tersebut, maka ada satu permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa republik Bataaf (1800-1811) ?

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : untuk mengetahui kondisi kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa republik Bataaf.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah (1) bagi penulis, bermanfaat dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki, melatih pola berpikir analitis, kritis dan logis serta dapat memperdalam pengetahuan penulisan sejarah. (2) bagi pembaca yang memiliki minat terhadap sejarah politik dan sosial ekonomi bagi masyarakat Jawa, dapat menambah cakrawala berpikir guna pengembangan pengetahuan selanjutnya, (3) bagi Alma mater, hasil penelitian ini dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa atau peneliti untuk mengadakan penelitian sejenis dengan lebih mendalam guna terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, selanjutnya penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember, (4) bagi peneliti-peneliti sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lain secara lebih mendalam.

Kegiatan penelitian ini memakan waktu dua belas bulan, terhitung sejak bulan oktober 1995 sampai dengan Oktober 1996. Tenggang waktu tersebut terhitung mulai dari pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi hingga menjadi naskah skripsi. Metode penelitian yang umum digunakan adalah metode sejarah (historical methode), khususnya metode bibliografis (kepustakaan). Untuk itu penulis memilih perpustakaan sebagai tempat penelitian.

Bagian akhir dari naskah skripsi ini, penulis tutup dengan bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan masalah dan penyajian hipotesis dalam penelitian ini meliputi; (1) bagaimana kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa republik Bataaf. Aspek politik, dalam menamakan eksploitasinya memeralat para Raja beserta Bupati dan aparat kerajaan hanya sebagai alat pemerintah kolonial Belanda untuk mengeksploitasi rakyat. Aspek sosial, mudarnya kepercayaan rakyat kepada para pemimpin dan semakin menguatnya ikatan feodal yang sengaja dipelihara oleh Belanda sebagai suatu cara eksploitasi tenaga kerja. Aspek ekonomi, rakyat sebagai sumber produksi untuk dua kepentingan, pertama kepentingan raja dan kedua kepentingan pemerintah Belanda. Akibatnya kehidupan masyarakat bawah yaitu golongan petani mengalami kemiskinan dan kesengsaraan, sedangkan masyarakat golongan atas yaitu para pemimpin pribumi kehidupan ekonominya semakin sejahtera dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Pihak Belanda sendiri kehidupannya semakin sejahtera karena adanya berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan dari para penguasa pribumi, untuk mengeksploitasi kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia.

Saran-saran yang penulis ajukan dalam penulisan ini ada tiga, yaitu (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah hendaknya lebih menguasai materi sejarah sebagai bekal seorang guru sejarah profesional, (2) kepada para sejarawan, hendaknya terus menggali fakta-fakta sejarah yang ada dan terus berusaha untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian yang kiranya belum sempurna guna mengembangkan ilmu sejarah dimasa mendatang, (3) bagi Alma mater, hendaknya terus mengembangkan pengadaan perpustakaan dan penelitian tentang sejarah Indonesia.

Demikian ringkasan skripsi ini, untuk penjelasan yang lebih rinci dapat disimak dalam bab-bab yang telah didiskripsikan dalam naskah skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	ix
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	5
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan	
1.3.1 Ruang Lingkup Permasalahan	8
1.3.2 Rumusan Permasalahan	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Pemerintahan Re- publik Bataaf di Indonesia	12
2.2 Pelaksanaan Pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia	14
2.3 Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf	18
2.4 Hipotesis	22

III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian	24
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah	26
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian	32
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Metode Analisa Data	34
3.5.1 Logika Induktif	35
3.5.2 Logika Komparatif	35

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Pelaksanaan Pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia	37
4.2 Pelaksanaan Pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia	39
4.3 Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf ...	48
4.3.1 Kehidupan Politik Masyarakat Jawa Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf ...	49
4.3.2 Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf ...	53
4.3.3 Kehidupan Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf ...	56

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran-saran	63

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Peta Pulau Jawa Pada Abad XVII-XVIII
3. Surat Permohonan Ijin Studi Literatur
4. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Petualangan para pelaut Spanyol dan Portugis pada abad XV berhasil membawa rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa. Hal ini menimbulkan hasrat yang besar bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Belanda, Perancis dan Inggris yang mengikuti jejaknya dan kemudian melakukan kolonisasi atas daerah-daerah yang disinggahinya. Kedatangan Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 bertujuan untuk berdagang. Dengan banyaknya kapal kongsi dagang Belanda di Indonesia, mengakibatkan persaingan yang keras diantara para pedagang Belanda sendiri, hal itu oleh pemerintah Belanda dianggap merugikan kepentingannya.

Untuk menghindari terjadinya persaingan diantara pengusahanya sendiri dan memperkokoh kedudukannya di kepulauan Nusantara. Pada tahun 1602 pemerintah Belanda mendirikan sebuah kongsi perdagangan yang diberi nama "Verenigde Oost indische Compagnie yang disingkat VOC" (Tjokropranolo, 1992:1). Maksud berdirinya VOC menurut Burger diktakan bahwa VOC mengurus semua kepentingan kerjasama, untuk menentang kekuasaan Spanyol dan Portugis. Kerjasama ini antara orang-orang Belanda karena perjalanan yang jauh dan berbahaya itu mempunyai resiko besar dan hanya dapat diperingan dengan kerjasama.

Pada awalnya VOC hanya merupakan kongsi perniagaan murni yang telah berubah fungsinya menjadi luas setelah melihat kemungkinan dapat mengembangkan usahanya. Pemerintah Belanda kemudian memberikan hak dan kekuasaan yang luar biasa (*exorbitante rechten*) kepada VOC, seperti: memperoleh hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri; mendapat hak monopoli perdagangan di Indonesia; mengumumkan perang pada raja-raja di Indonesia; dan berhak

mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Hak-hak kekuasaan istimewa yang didapat itu, maka VOC merupakan suatu alat kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia (Hardi, 1988:21).

Jelaslah bahwa VOC mulai mematikan kegiatan ekonomi bangsa pribumi dengan memegang monopoli secara mutlak hasil bumi. Adanya pemberian hak-hak istimewa tersebut, maka mulailah babak penjajahan Belanda di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh I Nyoman Dekker, bahwa pada awalnya VOC hanya bergerak di bidang ekonomi dan usaha perniagaan murni tanpa unsur politik. Akan tetapi dalam perkembangannya VOC telah merubah fungsinya menjadi suatu lembaga yang bergerak di bidang politik dan pemerintahan (1975:4).

Keberadaan VOC yang demikian ini mendapat reaksi dari bangsa Indonesia khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di pulau Jawa. Satu contoh adanya perlawanan kerajaan Mataram, Banten di Jawa dalam rangka menentang kekuasaan monopoli VOC yang menjalankan politik *divide et impera*. Politik ini dipakai VOC dalam rangka ikut campur tangan dalam intrik-intrik di istana Mataram maupun Banten (De Jonge, 1969:10). Penindasan dan pemerasan yang dilakukan VOC, menimbulkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan di VOC membutuhkan dana yang cukup besar untuk menghadapi perlawanan dari kerajaan Mataram, Banten di Jawa. Pada dasarnya perlawanan dari kerajaan-kerajaan tersebut tidak mengakibatkan keruntuhan VOC secara langsung, tetapi boleh dikatakan VOC tinggal menunggu saat kematiannya (Gonggryp, 1961:52). Senada dengan pendapat tersebut Hall mengungkapkan, bahwa keadaan keuangan VOC sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena perang, bertambahnya daerah dan jumlah pegawai yang terlibat di dalamnya membutuhkan biaya yang cukup besar pada saat perdagangan mengalami kemerosotan (1988:293).

Keruntuhan VOC ini semakin cepat dengan ditaklukkannya negeri Belanda oleh Perancis pada tahun 1795. Setelah itu dibangun suatu pemerintahan republik atau republik Bataaf di negeri Belanda (Van Leur, 1975:6). Beni Utoyo mengungkapkan, bahwa keruntuhan VOC sejalan dengan revolusi politik yang terjadi di negeri Belanda. Perkembangan politik di negeri Belanda dipengaruhi oleh revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1789. Kongkritnya dengan bantuan tentara Perancis, kaum Patriot di negeri Belanda telah menumbangkan kerajaan Belanda dan menggantikannya dengan suatu bentuk negara baru yang dinamakan Bataafsche Republik (1961:150). Pemerintah baru ini yang membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas wilayah yang ditinggalkan VOC dengan semua kerugian dan hutang yang bertumpuk. Hutang voc yang dibebankan kepada pemerintah Belanda sebesar 134,7 juta Gulden (Gonggryp, 1967:53).

Kuntuhnya VOC menyebabkan kekayaannya diambil alih kerajaan Belanda pada tanggal 1 Januari 1800. Pemerintah Belanda melanjutkan begitu saja politik tradisional dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi kepentingan kerajaan Belanda (Sartono Kartodirdjo, 1992:8-9). Perubahan kecil yang terjadi di Indonesia, karena personel-personel yang memegang jabatan masih tetap sama. Mereka masih mengikuti cara-cara lama dengan menghidupkan kembali feodalisme sebagai cara eksploitasi dengan memanfaatkan para raja dan aparat kerajaan sebagai alatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh I Nyoman Dekker, bahwa perubahan yuridis ini tidaklah membawa perubahan yang esensial. Hakekat dari perubahan penguasaan bangsa atas bangsa lain adalah tetap yaitu eksploitasi, yang berbeda hanya alat dan metodenya saja (1975:7).

Pemerintah yang baru ini menunjuk Gubernur Jendral untuk memerintah Indonesia atas nama pemerintah Belanda. Pergantian kekuasaan samasekali tidak merubah pelaksanaan kekuasaannya, bahkan mejadi lebih licik daripada sebelumnya (Tjokropranolo, 1992:3). Sebagaimana dikatakan oleh Suhartono, pemerintah Belanda menekankan pada usaha eksploitasi ekonomi yang dibarengi penetrasi politik (1994:8).

Selanjutnya terjadi perubahan besar dalam politik Belanda di Jawa. Dua tahun sesudah kekuasaan Louis Napoleon diumumkan di negeri Belanda tahun 1806, Marskal Herman Willem Daendels dikirim ke Batavia sebagai Gubernur Jendral (akira Nagazumi, 1989:12). Tugas Daendels yaitu, mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki sistem administrasi di tanah jajahan yang dinilai lainnya kurang dapat menjamin pihak penjajah (Hutauruk, 1952:14).

Ternyata pergantian pemerintah dari VOC kepada pemerintah Belanda ini tidak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat Jawa. Perluasan kekuasaan yang dilakukan VOC pada abad XVIII masih terus dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua macam pemerintahan itu pada dasarnya sama saja. Tujuan sama yaitu, mengeruk kekayaan bumi Indonesia pada umumnya dan pulau Jawa pada khususnya tanpa memperdulikan nasib rakyat. Keduanya pada dasarnya bertujuan menguras kekayaan bumi Jawa untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia telah menimbulkan keruntuhan kekuasaan politik penguasa pribumi, merosotnya kehidupan sosial ekonomi dan goyahnya cendi-cendi kehidupan tradisional penduduk pribumi. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, karena tema dan permasalahan yang penulis teliti tidak pernah diteliti sebelumnya oleh mahasiswa FKIP Universitas Jember.

Selain alasan tersebut diatas, ada alasan lain yang melatar belakangi penulisan ini. Sebagaimana yang dituturkan oleh Winarno Surakhmad, bahwa dalam memilih suatu topik penelitian sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) sesuai dengan minat dan kemampuan seorang peneliti, (2) permasalahan cukup penting untuk diteliti, (3) tersedianya bahan atau data sebagai acuan, (4) permasalahan memiliki batasan spasial dan temporal yang jelas, (5) tersedianya tenaga, waktu dan dana untuk melakukan penelitian (1982:34-36).

Selubungan dengan ini, penulis menyadari dan melihat kenyataan dilapangan, bahwa dalam kegiatan belajar dan praktek mengajar masih terdapat kelemahan-kelemahan terutama sekali tentang penguasaan materi. Oleh karena itu penulis merasa perlu meningkatkan dan mengembangkan penguasaan materi melalui studi literatur. Secara langsung dapat membantu maendalami materi dalam bidang sejarah.

Bertolak dari uraian diatas penulis memilih judul penelitian "KEHIDUPAN POLITIK DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA PADA MASA REPUBLIK BATAAF (1800-1811)".

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Agar terhindar dari kemungkinan terjadinya salah paham dan salah penafsiran antara penulis dan pembaca, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan pengertian judul penelitian. Selain itu untuk mencegah terjadinya salah penafsiran ataupun kekaburan arti dari judul diatas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu : (1) Politik, (2) Sosial Ekonomi, (3) Masyarakat Jawa, (4) Republik Batael.

1.2.1 Politik

Pengertian politik menurut W.J.W Poerwadarminta adalah segala hal yang menyangkut kenegaraan dan kemasyarakatan dengan cara dan kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan negara baik dalam dan luar negeri. Kedua negara itu bekerjasama dalam bidang ekonomi dan kebudayaan (1991:780). Menurut pendapat Miriam Budiarjo, politik diartikan segala macam proses yang menyangkut kepentingan suatu negara dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya untuk mencapai suatu tujuan (1988:8). Politik diartikan sebagai seni mengatur atau ilmu kenegaraan yang mencakup semua kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan yang menyangkut penetapan tugas dalam lingkungan urusan negara (Heuken, 1988:96).

Adapun yang dimaksud dengan politik dalam penelitian ini adalah segala hal yang menyangkut kenegaraan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia. Hal ini juga menyangkut kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap negara Indonesia untuk mencapai suatu tujuan dalam lingkungan urusan negara baik dalam dan luar negeri.

1.2.2 Sosial Ekonomi

Menurut W.J.S Poerwadarminta, kata sosial adalah sesuatu mengenai kemasyarakatan (1991:958). Kata ekonomi adalah menyangkut masalah keuangan, mata pencaharian (W.J.S Poerwadarminta, 1991:747).

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan kata sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyangkut hal-hal kemanusiaan dan kesejahteraan. Dalam hal menjelaskan kebijaksanaan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan, pemerintah kolonial Belanda menggunakan birokrasi tradisional sebagai cara eksploitasi tenaga rakyat.

1.2.3 Masyarakat Jawa

Masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik (Soerjono Soekanto, 1983:180). Menurut W.J.S Poerwadarminta, masyarakat diartikan sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama (1991:635).

Berkaitan dengan penelitian ini, masyarakat yang dimaksudkan adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lainnya berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik serta terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama yang secara geografis bertempat tinggal di pulau Jawa.

1.2.4 Republik Bataaf

Menurut Cheppy Hari Cahyono dikatakan, bahwa Bataafsche Republik adalah gabungan dari berbagai propinsi di Belanda yang diduduki oleh Perancis pada masa perang Revolusioner dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Selanjutnya Negeri Belanda dihadiahkan kepada Louis Napoleon yang dikenal sebagai negara Republik (1982:56). Bataafsche Republick / Batavian Republik yaitu negara Belanda yang direbut dan diduduki oleh tentara revolusioner Perancis (Mawarti Djoened Poesponegoro, 1988:32).

Berkaitan dengan pengertian ini yang dimaksud dengan Bataafsche Republik atau Republik Bataaf ialah gabungan dari berbagai propinsi di negara Belanda yang diduduki oleh Perancis pada masa perang revolusioner dan dihadiahkan kepada Louis Napoleon.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian secara keseluruhan adalah suatu kebijaksanaan yang dijalankan di Indonesia pada masa negara Belanda diduduki oleh Perancis, yang berkaitan langsung dengan kemasyarakatan dan kesejahteraan serta kehidupan rakyat di Jawa.

1.3. Ruang Lingkup dan rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran penelitian yang tepat. Dalam buku metodologi research, Sutrisno Hadi menyebutkan :

"Sekali suatu persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kericuhan pengertian kekaburan wilayah persoalannya" (1991:6).

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka penulis menganggap perlu membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan wilayah, maka ruang lingkup wilayah penelitian adalah pulau Jawa yang dimaksud bukan berarti membicarakan secara detail seluruh pulau Jawa, melainkan lebih difokuskan pada kejadian-kejadian di tingkat pusat, khususnya Batavia. Pada abad XIX pulau Jawa merupakan bagian utama dari kekuasaan kolonial Belanda (Robert Van Heil, 1994:15).

Ditinjau dari segi waktu, permasalahan penelitian ini mengambil scope temporal pada masa pemerintahan republik Bataaf. Diawali dari masa keruntuhan VOC dan berakhir pada masa penjajahan Inggris di Indonesia yaitu masa kekuasaan Stamford Raffle. Mengenai batasan waktu tersebut bukan berarti batasan absolut (mutlak). Maksudnya dalam hal-hal tertentu misalnya untuk menjelaskan masa pemerintahan republik Bataaf di Indonesia, penulis tidak hanya berpijak pada kejadian-kejadian pada masa tersebut tetapi juga terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa keruntuhan VOC, baik kejadian di bidang politik maupun sosial ekonomi yang ada pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya.

Hal lain agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka perlu penulis tegaskan pula tentang inti pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan pemerintahan republik Bataaf dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa. Dengan batasan tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian seperti di bawah ini.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Pelaksanaan penelitian selalu bertitik tolak dari adanya permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan rumusan permasalahan penelitian pada hakekatnya adalah segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya atau segala bentuk hambatan atau rintangan dan kesulitan yang perlu dipecahkan (Moh. Ali, 1985:38). Dengan kata lain masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya (Winarno Surakhmad, 1982:34).

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup, maka permasalahan yang penulis ketengahkan adalah:

1. Bagaimana kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa pemerintahan republik Bataaf (1800-1811)?

1.4 Tujuan Penelitian

kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti mempunyai tujuan tertentu. Begitu juga dengan penelitian sejarah yang penulis lakukan ini. Menurut pendapat Sutrasno dikatakan, bahwa penelitian sejarah minimal harus mempunyai dua tujuan yaitu : (1) memberikan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya tentang sejarah, (2) membimbing dan mengajar mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realitis (1975:22).

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa pemerintahan republik Bataaf (1800-1811).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti di bawah ini.

1. bagi penulis, akan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki, melatih pola berfikir yang analitis, kritis dan logis serta dapat memperdalam pengetahuan penulisan sejarah;
2. bagi pembaca, terutama yang memiliki minat terhadap sejarah politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa, dapat menambah cakrawala berfikir guna pengembangan pengetahuan;
3. bagi Alma mater, hasil penelitian ini dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa atau peneliti untuk mengadakan penelitian sejenis dengan lebih mendalam guna pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selanjutnya hasil penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember;
4. bagi peneliti-peneliti sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lain secara lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Pemerintahan Republik Balaai di Indonesia

Semula para pedagang Belanda datang ke Indonesia dengan maksud menguasai perdagangan yang menguntungkan, khususnya rempah-rempah. Hal ini didorong oleh hasrat bersaing dengan Portugis di perairan timur yang dilakukan oleh VOC sejak tahun 1602. Pada tahun 1619 VOC berhasil memperoleh tempat berpijak bagi perdagangannya di Banten dan berlanjut pada tahun 1620 dengan menyingkirkan para pesaingnya yaitu Portugis dan Inggris, untuk mendapatkan basis kekuasaannya. Keberhasilan ini mendorong banyaknya kapal kongsi dagang Belanda di Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan yang keras diantara para pedagang Belanda sendiri, hal itu oleh pemerintah Belanda dianggap merugikan kepentingan perniagaannya. Untuk menghindari persaingan tersebut pemerintah Belanda membentuk suatu badan perniagaan yang disebut VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1602.

Sebagai suatu persekutuan dagang VOC bertujuan untuk mencari untung sebanyak-banyaknya. Pada awalnya VOC enggan campur tangan di dalam pertikaian antara para raja di Jawa, selama keamanan tempat mereka berpijak tidak terancam. Untuk mencapai tujuan itu salah satu jalan yang perlu ditempuh ialah bersahabat dengan para pembesar yang ada di Jawa (Slamet Muljana, 1980:73, Akira Nagazumi, 1989:11). Itulah sebabnya VOC sejak memperoleh pangkalan di Jayakarta, segera mengadakan hubungan dengan pembesar di Banten dan Mataram.

Keberhasilan VOC memperoleh pangkalan dagang di Jayakarta menimbulkan keinginan yang lebih besar, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga bidang politik. Untuk itu VOC yang pada awalnya merupakan kongsi perniagaan murni telah berubah fungsinya menjadi lebih luas setelah

melihat kemungkinan untuk mengembangkan usahanya. VOC sebagai kongsi dagang yang didirikan pada tahun 1602 memperoleh hak kedaulatan dari pemerintah Belanda, seperti: memperoleh hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang; berhak memerintah daerah-daerah di luar Nederland dan mendirikan badan peradilan; serta berhak mengadakan perjanjian dengan negara lain (G. Moedjanto, 1989:16, Hardi, 1988:21, Tjokropranolo, 1992:1). Adanya hak-hak kekuasaan istimewa tersebut, menyebabkan VOC menjadi suatu alat pemerintah Belanda di Indonesia.

Pemberian hak-hak istimewa tersebut merupakan awal babak penjajahan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh I Nyoman Dekker, bahwa pada awalnya VOC hanya bergerak di bidang ekonomi dan usaha perniagaan murni tanpa unsur politik. Dalam perkembangannya VOC telah merubah fungsinya menjadi suatu lembaga yang bergerak di bidang politik dan pemerintahan (1975:4). Jelaslah bahwa VOC mulai mematikan kegiatan ekonomi bangsa pribumi dengan memegang monopoli secara mutlak hasil bumi. Hal tersebut menimbulkan suatu perlawanan dari bangsa Indonesia khususnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di pulau Jawa. Misalnya perlawanan dari kerajaan Mataram dan Banten dalam rangka menentang kekuasaan VOC yang menjalankan politik *diveede et impera*. Politik ini dipakai VOC dalam rangka campur tangan di dalam pertikaian di istana Mataram dan Banten (Akira Nagazumi, 1989:11). Hal ini karena Mataram dan Banten merupakan kerajaan utama di Jawa yang harus didekati.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa VOC pada awalnya hanya sebagai suatu persekutuan dagang murni telah merubah fungsinya menjadi suatu lembaga yang bergerak di bidang politik dan pemerintahan, sehingga sebagai persekutuan dagang tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak itu mulai tanggal 31 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan, selanjutnya tanggung jawab pemerintahan di Indonesia diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda.

2.2 Pelaksanaan Pemerintahan Republik Batavia di Indonesia

Pada awal kedatangannya VOC enggan campur tangan di dalam pertikaian para raja di Jawa. Setelah adanya serangkaian perang suksesi yaitu pecahnya kerajaan Mataram pada tahun 1755 merupakan campur tangan Belanda. Kerajaan yang selama bertahun-tahun kehilangan kekuasaannya atas apapun kecuali daerah inti, oleh campur tangan Belanda pada tahun 1755 lalu dipecah. Sebuah kerajaan diperintah oleh suseuhunan di Surakarta dan sebuah lagi sultan di Yogyakarta. Sejak pertengahan abad XVII tersebut VOC mulai ikut campur urusan politik di Jawa, dengan melindungi salah seorang pemuntut atas tahta yang sedang bersaing. Menurut pendapat Kansil, VOC melaksanakan politik monopoli dengan hongitoc-tennya atau campur tangan dalam masalah kerajaan di Indonesia. Pada hakekatnya itu merupakan pengurusan kekayaan bangsa Indonesia oleh suatu kongsi dagang yang dilindungi oleh pemerintah Belanda (1988:11).

Ketika raja-raja Indonesia kalah melawan VOC banyak daerah yang diserahkan kepada VOC dan daerah-daerah itu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Hal ini merupakan awal campur tangan Belanda dalam masalah kerajaan di Indonesia pada umumnya (Moh. Ali, 1952:32). Keberadaan VOC yang demikian ini menimbulkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara lewat peperangan (Hardi, 1988:23). Untuk ini VOC membutuhkan dana yang cukup besar guna menghadapi perlawanan dari kerajaan Banten dan Mataram. Senada dengan pendapat itu Hall mengemukakan, bahwa keadaan VOC sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena perang, bertambahnya jumlah daerah dan jumlah pegawai yang terlibat di dalamnya membutuhkan biaya yang besar pada saat perdagangan mengalami kemerosotan (1988:293).

Menurut I Nyoman Dekker, runtuhnya VOC ini disebabkan dalam bidang keuangan mengalami kebangkrutan. Hutangnya sangat banyak, pegawainya banyak yang korupsi, sehingga

sebagai badan perniagaan hampir selalu mengalami kerugian (1975:5). Senada dengan pendapat tersebut Burger mengatakan, bahwa keruntuhan VOC sebagai akibat para pemimpinnya yang kurang bertanggung jawab, pembukuannya tidak baik serta adanya tradisi korupsi diantara para pegawainya (1962:74). Sebagai suatu kongsi perniagaan yang memperoleh hak memerintah daerah-daerah di Indonesia, VOC tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini disebabkan adanya korupsi yang merajalela serta adanya persaingan dagang dengan negara lain (G. Moedjanto, 1989:17).

Sebagai negara penjajah, Belanda berusaha meningkatkan usaha dagang yaitu dengan membentuk organisasi dagang yang bernama VOC. Oleh karena kerunyaman dalam pengelolannya menyebabkan VOC mengalami kemunduran, sehingga pada tahun 1795 ijin (oktroinya) dihapuskan.

Keberadaan VOC yang demikian ini mempercepat keruntuhannya ditambah lagi putusnya hubungan antara Indonesia dengan Nederland, sehingga tidak ada harapan lagi mendapatkan subsidi dari negeri induk (Beni Utoyo, 1961:149). Keruntuhan VOC ini lebih banyak disebabkan oleh faktor politik daripada faktor ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh I Nyoman Dekker, bahwa pada akhir abad XVIII, yaitu tahun 1795, negeri Belanda ditaklukan oleh Perancis. Selanjutnya dibangun suatu pemerintahan republik yang bernama republik Bataaf (1975:5). Disamping itu pemerintah Belanda beranggapan bahwa badan perniagaan sejenis VOC tidak dapat diharapkan menanggung dana dan tenaga, untuk mewujudkan suatu pertahanan yang kuat. Atas dasar pemikiran itu maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan sejak tanggal 1 Januari 1800, resmi berkuasa pemerintah Belanda. Hutang VOC dan semua kerugian diambil alih oleh pemerintah Belanda, sebesar 134 juta Gulden (Beni Utoyo, 1961:151).

Pergantian kekuasaan dari VOC ketangan pemerintah Belanda, tujuannya tetap sama bagi kepentingan bangsa Belanda. Daerah jajahan tetap sebagai tempat mengadu untung untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Senada dengan itu Tjokropranolo mengungkapkan, bahwa pergantian kekuasaan sama sekali tidak merubah pelaksanaan kekuasaan, bahkan menjadi lebih licik dari masa sebelumnya (1992:3). Semua itu dilakukan dengan mengeksploitasi kekayaan pulau Jawa agar dapat memperoleh keuntungan yang besar, suatu sasaran yang menjadi fokus pemikiran orang-orang Belanda sejak keberangkatan pelayarannya yang pertama ke Indonesia pada tahun 1595 (Ricklefs, 1992:183). Perpindahan kekuasaan ke tangan pemerintah Belanda tidak membawa perubahan yang berarti, karena pemerintah Belanda hanya melanjutkan begitu saja politik yang telah diletakkan oleh VOC. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan kecil yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya adalah penguasaan bangsa atas bangsa lain terutama ditekankan pada eksploitasi ekonomi dan pemerintahan. Menurut Hall, dikatakan bahwa hilangnya VOC menyebabkan sedikit perbedaan masalah pengaturan di Indonesia, tetapi tujuannya tetap sama yaitu eksploitasi untuk memperoleh keuntungan keuangan negeri Belanda (1988:443).

Pada tahun 1808 mulai berlangsung suatu jaman baru dalam hubungan Jawa dengan negeri Belanda, yang saat itu negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Perancis sejak tahun 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai penguasa negeri Belanda pada tahun 1808. Dua tahun sesudah kekuasaan Louis diumumkan di negeri Belanda, Marsekal Herman Willem Daendels dikirim ke Batavia sebagai Gubernur Jendral (Ricklefs, 1992:189). Tugas Daendels yaitu mengatur pemerintahan dan memperkuat pertahanan militer di Jawa untuk kepentingan Perancis (D.G.E. Hall, 1988:445). Sebagai seorang gubernur

Jenderal Daendels memiliki kekuasaan khusus yang lebih tinggi dari Dewan Hindia Belanda. Kekuasaan khusus tersebut menyebabkan Daendels memutuskan hubungan dengan negeri induk, guna dapat bertindak secara bebas. Kekuasaan yang luar biasa tersebut mengakibatkan Daendels mendapat tugas memperkuat pertahanan di pulau Jawa. Dalam hal ini Daendels memperoleh kekuasaan penuh untuk mempertahankan kepentingan Nederland di Indonesia. Pada kenyataannya hanya pulau Jawa yang dapat dipertahankan, usaha ini berakhir sia-sia karena pada tahun 1811 pulau Jawa diserbu Inggris (Beni Utoyo, 1961:152). Daendels masih tertolong sedikit namanya karena pada tanggal 15 Mei 1811, ia digantikan oleh Janssen (bekas gubernur Afrika Selatan). Janssen memerintah hanya sebentar dari tanggal 15 Mei 1811 sampai dengan 18 September 1811, dengan mewarisi keadaan yang sangat buruk di Indonesia, terutama menghadapi perlawanan-perlawanan dari rakyat. Sedangkan di pihak lain harus menghadapi gempuran pasukan Inggris. Dalam pertempuran antara Belanda dan Inggris, Belanda mengalami kekalahan di Tuntang (Salatiga). Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang (Tjokropranolo, 1992:4). Pada tanggal 18 September 1811 ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang oleh Janssen dari pihak Belanda dan S. Auchmuty dari Inggris. Isi Kapitulasi Tuntang sebagai berikut: 1) seluruh pulau Jawa diserahkan kepada Inggris; 2) semua serdadu menjadi tawanan dan semua pegawai yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus; 3) semua hutang-hutang pemerintah Belanda yang dulu tidak akan ditanggung oleh Inggris (Beni Utoyo, 1961:152, I Nyoman Dekker, 1975:35). Secara resmi Kapitulasi Tuntang mengakhiri kekuasaan Belanda-Perancis di Indonesia.

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa VOC sebagai suatu kongsi dagang yang didirikan pada tahun 1602 telah memperoleh hak kedaulatan dari pemerintah Belanda, sehingga VOC bukan hanya bergerak di bidang ekonomi tapi juga di bidang pemerintahan. Pemberian hak-hak kedaulatan tersebut menyebabkan dimulainya babak penjajahan Belanda di Indonesia.

2.3 Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Situasi dan kondisi kehidupan politik pada masa akhir abad XVIII, di Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya tampak adanya perkembangan yang berbeda yaitu kekuasaan pemerintah Belanda semakin meluas dan mendalam. Sementara di pihak lain kekuasaan para penguasa pribumi makin lama makin merosot. Perkembangan ini sesungguhnya hanya merupakan perkembangan yang sudah dirintis oleh VOC sejak keberangkatannya yang pertama ke Indonesia pada tahun 1595.

Pengaruh kekuasaan Belanda di bidang politik semakin kuat. Hal ini dikarenakan terjadi dualisme dalam pemerintahan, yang menyebabkan para raja beserta bupati dan aparat kerajaan hanya sebagai alat (Moh. Ali, 1952:32). Ini pula yang menyebabkan kekuasaan penguasa pribumi seperti sultan dan raja semakin kecil serta semakin tergantung pada kekuasaan penjajah. Secara langsung penguasa Belanda mempunyai hak untuk mencampuri urusan pemerintah kerajaan. Dalam hal ini pemerintah Belanda ikut ambil bagian dalam pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, kebijaksanaan mengelola pemerintahan dan sebagainya ada dibawah kekuasaan Belanda (Sartono Kartodirdjo, 1975:123).

Jadi dapat dikatakan bahwa birokrasi tradisional kerajaan di Indonesia berubah secara menarik dalam masa penjajahan. Sejak abad XVIII penguasa di Batavia sudah berhubungan dengan birokrasi itu. Pejabat birokrasi tradisional di Jawa dinamakan priyayi (kerabat kraton). Dalam proses interaksi antara kaum priyayi dan penguasa Belanda menimbulkan suatu jaringan hubungan khas. Para priyayi yang sebelumnya merupakan alat kekuasaan dari para sultan di kerajaan berubah menjadi alat perantara bagi pemerintah Belanda (Leirissa, 1985:13).

Disamping itu banyak daerah kerajaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kedudukan penguasa pribumi, para bupati dan aparat kerajaan hanya sebagai alat kekuasaan Belanda yang turut serta mengeksploitir kekayaan bumi Indonesia bagi kepentingan penjajah. Penghasilan para penguasa pribumi tidak lagi tergantung kepada penghasilan yang diperolehnya dari upeti, hasil bumi dari tanah yang dikuasainya, melainkan dari gaji berupa uang. Kedudukan para sultan dan raja yang hanya menjadi alat kekuasaan pemerintah Belanda menyebabkan derajat dan kehormatannya semakin merosot.

Selain itu praktek-praktek pemerasan dan penindasan dilakukan para penguasa pribumi maupun penguasa kolonial dalam menjalankan pemungutan pajak, kerja paksa, penyewaan tanah serta penyalahgunaan wewenang menjadikan rakyat di pedesaan tidak memiliki lagi tempat berlindung dan tempat untuk menyatakan keberatan-keberatan yang dialaminya. Akibatnya mental para penguasa yaitu para bupati dan kepala desa menjadi merosot. Sebab lain yaitu adanya "cultur pro-centen" yaitu persenan yang diberikan pada para pegawai apabila mereka mampu menarik pajak ataupun menghasilkan produksi tanaman perkebunan yang melebihi target. Hal ini mengakibatkan para pegawai menjadi pegawai yang buruk, mematikan rasa kemanusiaan, menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat (Gonggryp, 1967:89).

Kemerosotan mental yang dialami para bupati dan kepala desa mengakibatkan semakin mudarnya kepercayaan rakyat pada pemimpinnya. Seharusnya pemimpin menjadi pelindung bagi rakyat yang dipimpinnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka digunakan sebagai alat pemerintah Belanda untuk menindas rakyat.

Untuk memperbesar pengaruh, para bupati selain mendapat *cultur proccenten* juga mendapatkan tanah jabatan yang sifatnya turun temurun. Hal ini dapat memperkuat posisinya dalam masyarakat (Gonggryp, 1967:103). Begitu juga kepala desa diberi kekuasaan (kebebasan) bertindak, sehingga kekuasaan di desanya bertambah besar (Burger, 1962:182).

Pemberian hak-hak istimewa tersebut sangat menguntungkan kalangan elite bangsawan seperti golongan bupati dan kepala desa, karena kedudukannya menjadi lebih aman ditinjau lagi adanya pergantian jabatan secara turun temurun. Dari hal tersebut para pemimpin rakyat ini telah terpisah dari masyarakatnya, menjadi tunduk pada kekuasaan pemerintah Belanda. Hal ini menimbulkan kedudukannya sebagai pemimpin rakyat atau masyarakat mulai ditinggalkannya (Ricklefs, 1992:186). Jadi dapat dikatakan bahwa kekuasaan bupati dan kepala desa menjadi semakin besar dengan dukungan penguasa kolonial, namun di mata rakyat telah berubah menjadi agen penguasa kolonial. Pemimpin-pemimpin rakyat hanyalah pelaksana-pelaksana yang diperintah dari atas (Sartono Kartodirdjo, 1993:14, Burger, 1962:182).

Ikatan feodal sengaja dipelihara oleh Belanda sebagai suatu cara eksploitasi tenaga rakyat. Dalam sistem feodal kepasrahan rakyat adalah suatu kewajiban kepada seorang penguasa. Masa ini yang berkuasa bukanlah penguasa pribumi yang bijaksana tetapi penguasa penjajah Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. Hal ini menimbulkan reaksi perlawanan dari rakyat karena harga diri dan martabatnya terinjak-injak.

Dalam dunia perdagangan VOC mengeluarkan peraturan monopoli perdagangan dengan menguasai secara mutlak seluruh perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Usaha-usaha monopoli rempah-rempah oleh Belanda dimaksudkan untuk memperoleh untung yang besar. Usaha ini dilakukan dengan cara pelayaran hongi dan ekstirpasi. Pelayaran hongi adalah pelayaran dengan menggunakan perahu yang dilakukan tiap tahun untuk membinasakan tanaman perdagangan milik penduduk agar tidak terjadi perdagangan gelap. Sedangkan ekstirpasi yaitu pembumihangusan tanaman produksi yang melebihi target agar harganya tidak merosot, karena produksinya terlalu banyak. Tindakan ekstirpasi terutama dilakukan pada tanaman pala dan cengkeh, karena pala dan cengkeh merupakan komoditi perdagangan yang laku keras di pasaran Eropa.

Kondisi pertanian masyarakat juga mengalami kemerosotan, yang pada awalnya para petani memenuhi kebutuhan hidupnya dengan barter yaitu tukar menukar barang dengan barang. Keadaan seperti ini mengalami perubahan dengan datangnya penjajah Belanda, yang menerapkan sistem monopoli hasil pertanian yang sangat merugikan rakyat. Selain itu meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan perbandingan jumlah penduduk dengan produktivitas tanah pertanian tidak lagi seimbang. Sementara itu usaha-usaha efisiensi penggunaan tanah tidak dapat dijalankan, karena petani-petani di Jawa adalah petani miskin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moh. Ali, bahwa rakyat yang terlibat dalam produksi pertanian hanya sebagai pekerja kasar (kuli) yang tidak mengenyam hasil produksinya (1952:84). Keadaan rakyat ini semakin sengsara karena tenaga mereka juga terserap untuk kerja rodi tetapi masih dituntut untuk membayar pajak.

Sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda memberatkan penduduk yang berpenghasilan rendah, karena sebagian besar terdiri dari orang-orang pribumi. Sedangkan di pihak lain sangat menguntungkan golongan yang

berpendapatan tinggi (orang-orang Eropa). Satu-satunya golongan yang diwajibkan membayar pajak langsung kepada pemerintah kolonial adalah para petani yang merupakan golongan terbesar. Dalam hal ini penduduk dipaksa untuk membantu kelancaran pelaksanaan politik kolonial di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digaris bawahi bahwa penetrasi kekuasaan kolonial Belanda telah menimbulkan keruntuhan kekuasaan politik penguasa pribumi, merosotnya kehidupan sosial ekonomi dan goyahnya sendi-sendi kehidupan tradisional penduduk pribumi. Adanya hal tersebut menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia.

2.4 Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua penggalan kata yaitu Hypo yang berarti di bawah dan Thera yang berarti kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu teori sementara ke arah kebenaran atau kebenaran perlu diuji (dibawah kebenaran) (Suharsini Arikunto, 1987:62). Menurut Moh. Nazir, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu (1988:128). Winarno Surakhmad mengungkapkan, hipotesis merupakan suatu teori sementara sebagai petunjuk sementara ke arah pemecahan masalah (1990:68). Sejalan dengan pendapat di atas Sutrisno Hadi mengartikan hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu tergantung kepada hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan (1990:63)".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui analisa terhadap fakta-fakta sejarah yang berhasil dihimpun oleh peneliti.

Keberadaan hipotesis ini bersifat sementara tapi hipotesis amat diperlukan dalam suatu penelitian, karena hipotesis mempunyai fungsi: (1) memeberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja peneliti, (2) menyiagakan peneliti ada kondisi fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti, (3) sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta ke dalam kesatuan penting dan menyeluruh, (4) sebagai panduan dan pengujian serta penyesuaian fakta diantara fakta (Kartini Kartono, 1988:183).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban sementara tentang Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Pemerintahan Republik Bataaf adalah sebagai berikut : kondisi kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa pemerintahan republik Bataaf meliputi beberapa aspek yaitu : aspek politik, dalam menjalankan eksploitasinya pemerintah Belanda memeralat para raja beserta para bupati dan aparat kerajaan untuk memeras dan menindas rakyat bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Aspek sosial, mudarnya kepercayaan rakyat kepada para pemimpin dan semakin menguatnya ikatan feodal yang sengaja dipelihara oleh Belanda sebagai suatu cara eksploitasi tenaga kerja. Aspek ekonomi, rakyat sebagai sumber produksi untuk dua kepentingan yaitu kepentingan raja dan pemerintah Belanda. Akibatnya kehidupan masyarakat bawah yaitu golongan petani semakin miskin dan sengsara, sedangkan golongan masyarakat atas yaitu para penguasa pribumi kehidupan ekonominya semakin sejahtera dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Pihak Belanda sendiri kehidupannya semakin sejahtera karena adanya berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan dari para penguasa pribumi, untuk mengeksploitasasi kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian, agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang artinya jalan sampai. Pengertian metode menurut Winarno Surakhmed, merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan (1982:131). Sedangkan menurut Mardalis, metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian (1990:24).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian penelitian menurut Mardalis, diartikan sebagai upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijelaskan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (1990:24). Menurut Sumardi Suryabrata adalah sebagai berikut:

"Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain (1988:65)".

Sementara itu Sutrieno Hadi menjelaskan pengertian penelitian yang biasa disebut *research* adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (1991:4).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, menurut langkah-langkah tertentu (terorganisir) dengan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Moh. Ali berpendapat bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi (1985:21). Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yang dipersiapkan baik-baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan penelitian (Kartini Kartono, 1990:2) Sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Nazir, metode penelitian adalah merupakan pemandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan serta alat-alat apa yang akan digunakan (1985:51).

Berdasarkan batasan-batasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dengan hati-hati dan sempurna guna menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dilakukan secara ilmiah. Sedangkan langkah-langkah berfikir menurut John Dewey seperti yang dikutip Hadari Nawawi adalah: (1) adanya suatu kebutuhan (the felt need), (2) menetapkan masalah (the problem), (3) menyusun hipotesis (the hypothesis), (4) pengumpulan data untuk pembuktian (collection of data as evidence), (5) menarik kesimpulan, (6) menetapkan manfaat dari kesimpulan yang berlaku secara umum (general value of the conclusion) (1991:20-21).

Metode penelitian menurut Winarno Surakhmad diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: (1) metode penelitian historik, (2) metode penelitian eksperimen, (3) metode penelitian deskriptif (1985:29). Menurut klasifikasi metode penelitian tersebut, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah.

Metode penelitian historik menurut Moh. Nazir ada empat yaitu: 1) penelitian sejarah komparatif; 2) penelitian yuridis atau legal; 3) penelitian biografis; 4) penelitian bibliografis (1985:61). Dari keempat macam penelitian tersebut, penelitian bibliografis yang sesuai dan penulis pergunakan. Menurut Hadari Nawawi disebut penelitian kepustakaan (1991:82). Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat dari para ahli dalam suatu masalah (Moh. Ali, 1985:62). Penelitian kepustakaan ini dalam bahasa Inggris disebut Library research artinya penelitian dengan mempergunakan sumber-sumber buku atau yang lain dalam suatu perpustakaan (library). Jadi literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan tertulis (Hadari Nawawi, 1991:30). Penelitian semacam ini dapat pula disebut studi literatur. Dalam penelitian ini penulis menghimpun karya-karya tertentu serta memberikan kritik dan interpretasi juga generalisasi yang sedapat mungkin mampu dipertanggungjawabkan keautentikannya.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Pengertian metode penelitian sejarah menurut Moh. Nazir adalah sebagai penyelidikan yang kritis dan hati-hati terhadap pengadaaan dan pengalaman masa lampau serta pengembangan dan menimbang dengan cukup teliti keterangan yang diperoleh sekaligus diinterpretasikan (1985:54-55). Metode penelitian sejarah dapat pula diartikan, suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau suatu masalah dari perspektif sejarah (Moh. Ali, 1985:117). Senada dengan pendapat itu Tatang M. Amirin mengungkapkan bahwa penelitian historik merupakan kajian logik terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dengan mendasarkan diri pada

gambaran tertulis maupun lisan (1990:110). Sedangkan menurut Winarno Surakhmad dikatakan, bahwa metode penelitian sejarah diartikan sebagai penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dan perspektif historik (sejarah) suatu masalah (1982:132).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian sejarah adalah aturan-aturan mengenai prosedur kerja peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi imajinatif secara objektif tentang masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut.

Menurut Moh. Nazir, ciri-ciri metode penelitian sejarah ada empat yaitu:

1. metode sejarah lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa lampau,
2. data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibandingkan dengan data sekunder. Bobot data harus dikritik baik secara internal maupun eksternal,
3. metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun dikutip dalam bahan acuan yang standar,
4. sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama pengarang, tempat dan waktu. Sumber tersebut harus diuji kebenaran dan keasliannya. Fakta harus dibenarkan oleh sekurang-kurangnya dua saksi yang tidak pernah berhubungan (1985:56).

Metode penelitian sejarah terbagi menjadi empat langkah yaitu: (1) heuristik, (2) kritik, (3) Interpretasi, (4) historiografi. (Nugroho Notooesanto, 1971:17).

3.2.1 Heuristik

Langkah pertama yang harus dilalui dalam menyusun cerita ialah usaha untuk menemukan jejak-jejak sejarah. Dalam metode sejarah kegiatan ini disebut heuristik (dari bahasa Yunani *heuriskein*) yang berarti mencari atau menemukan, maksudnya mencari serta menemukan jejak-jejak sejarah (I Gde Widja, 1988:19). Menurut Nugroho Notosusanto, kata heuristik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pula menemukan sumber-sumber (1971:18). Heuristik diartikan sebagai kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang akan digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah (Sutrasno, 1975:45).

Berdasarkan pendapat di atas, heuristik adalah langkah pertama dari penelitian sejarah yang merupakan suatu proses mencari untuk menemukan sumber sejarah yang berupa jejak-jejak masa lampau. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: (1) sumber benda (bangunan, senjata, perkakas), (2) sumber tertulis (dokumen), (3) sumber lisan (hasil wawancara) (Nugroho Notosusanto, 1971:18).

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat bibliografis, maka sumber-sumber yang dipergunakan adalah sumber tertulis, sehingga jejak-jejak sejarah yang dihimpun berupa buku-buku sumber yang memuat pendapat-pendapat para ahli sejarah tentang masalah yang diteliti. Adapun sumber tertulis tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekender. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekender adalah kesaksian daripada seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Orang tersebut memperoleh sumber dari orang lain (Louis Gottscalk, 1975:35). Dari kedua sumber tersebut penulis banyak menggunakan sumber sekender. Hal ini disebabkan selain sumber ini mudah didapat, juga berfungsi memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber aslinya (Kartini Kartono, 1991:73).

Meskipun sumber-sumber yang digunakan bersifat sekunder tetapi dalam pemakaiannya telah diseleksi sehingga kebenaran tidak kalah dengan sumber primer. Selain itu penulis memakai sumber pokok dan sumber penunjang sebagai sumber acuan. Sumber pokok adalah sumber sumber yang banyak dipakai atau menjadi acuan pokok dalam memecahkan masalah yang dibahas. Sedangkan sumber penunjang adalah sumber tambahan yang menunjang sumber pokok. Dalam hal ini penulis banyak mempergunakan sumber penunjang. Hal ini dikarenakan penulis banyak menemukan sumber-sumber yang mengupas permasalahan penelitian yang akan disusun tidak secara khusus tapi secara umum dan kurang detail pembahasannya.

Dari sumber-sumber yang diperoleh melalui aktivitas heuristik kemudian sumber-sumber sejarah tersebut diolah melalui suatu proses yang disebut kritik.

3.2.2 Kritik

Apabila seorang sejarawan telah berhasil menemukan atau mengumpulkan jejak sejarah sebagai sumber cerita sejarah. Langkah berikutnya yang perlu dikerjakan adalah menilai, menguji atau menyeleksi sumber yang benar-benar diperlukan, asli (otentik) dan mengandung sumber informasi yang relevan dengan subyek sejarah yang hendak disusun (Louis Gottschalk, 1975:80, I Gde Widja, 1988:21). Menurut pendapat Winarno Surakhmad, kritik dimaksudkan sebagai tahap memilah-milah dan mengkaji sumber-sumber yang telah diperoleh. Untuk mengetahui sumber tersebut asli dan dapat dipercaya atau tidak (1982:134). Pengujian sumber sejarah tersebut dimaksudkan agar dapat menemukan fakta-fakta sejarah, karena sumber tersebut pada dasarnya masih merupakan bahan-bahan mentah belaka untuk disusun menjadi fakta sejarah (Nugroho Notoeueanto, 1971:41). Fakta sejarah adalah suatu unsur yang dijabarkan secara langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap sesuai dengan ketentuan metode sejarah (Louis Gottschalk, 1975:96).

Kritik terhadap sumber sejarah mempunyai dua fase, yaitu: (1) kritik ekstern, yaitu kritik yang dilakukan untuk mengetahui sumber itu asli atau tiruan, (2) kritik intern, yaitu kritik yang dilakukan untuk meneliti kebenaran isi sumber itu (Winarno Surakhmad, 1990:35). Jadi kritik ekstern berkaitan dengan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan dan kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber itu memang dapat dipercaya, buktinya dapat diperoleh dengan cara: (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber, (2) membandingkan dari pelbagai sumber (Nugroho Notosusanto, 1971:21).

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa langkah kritik adalah kegiatan menilai atau menyeleksi sumber atau jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber atau jejak yang benar dalam arti benar-benar diperlukan, asli (autentik) serta mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun.

3.2.3 Interpretasi

Pengertian interpretasi menurut Nugroho Notosusanto adalah menetapkan makna dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah dihimpun (1971:17). Dari beberapa fakta yang lepas satu sama lain itu harus dirangkai dan dihubung-hubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan logis (1971:23). Kesemuanya itu untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah (Winarno Surakhmad, 1982:132). Hal senada diungkapkan oleh I Gde Widya, bahwa fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara satu fakta dengan fakta lain kelihatan rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kesesuaian dengan lainnya (1988:23). Dengan kata lain rangkaian fakta-fakta

itu harus menunjukkan rangkaian yang bermakna dari gejala-gejala, peristiwa atau gagasan yang ditulis di masa lampau dalam arti tersusun secara sistematis, kronologis dan logis.

Fakta menurut Sartono Kartodirdjo, diartikan sebagai suatu konstruksi yang dibuat oleh sejarawan, maka sebenarnya telah mengandung faktor subyektif, yaitu unsur subyek dalam hal ini penulis sendiri (1992:88).

Jadi pengertian interpretasi adalah aktivitas merangkai dan menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta sejarah dengan berusaha seobyektif mungkin sehingga dapat mengungkapkan kehidupan masyarakat masa lampau. Dengan kata lain aktivitas sejarawan dalam memilih fakta-fakta yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, kemudian merangkai fakta-fakta yang telah dibangunnya sendiri dari data-data secara logis, rasional dan faktual serta kausalitas sehingga menjadi suatu kisah sejarah.

3.2.4 Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah adalah kegiatan penulisan sejarah (historiografi). Historiografi diartikan sebagai kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah (Louis Gottschalk, 1975:32).

Selanjutnya Nugroho Notosusanto, mengartikan historiografi sebagai klimak dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah, yaitu menuliskan hasil interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (1971:24).

Pada tahap inilah persoalan kemahiran mengarang diperlukan oleh seorang sejarawan. Masalah bahasa tidaklah berbeda dengan bidang-bidang lain yang mempergunakan bahasa. Yakni memakai bahasa yang baik dan benar (Nugroho Notosusanto, 1971:24).

Metode yang penulis gunakan dalam menyajikan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta sebagaimana adanya dengan penekanan untuk membentangkan gambaran yang obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1991:63). Dengan demikian metode deskriptif berusaha melukiskan peristiwa apa adanya sesuai dengan kondisi dan situasi waktu itu berdasarkan imajinatif yang bertanggung jawab dalam arti menghubungkan fakta yang satu dengan lain secara harmonis, sehingga tercipta suatu tulisan (cerita sejarah) yang segar dan ilmiah. Metode deskriptif bukan saja memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasinya dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Moh. Ali, 1985:64). Jadi historiografi dengan menggunakan metode deskriptif adalah berusaha melukiskan peristiwa secara kronologis, logis, sistematis dengan mengkaitkan atau merangkaikan fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta tersebut, sehingga akan terwujud suatu kisah sejarah yang ilmiah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan, untuk tempat penelitiannya adalah perpustakaan-perpustakaan. Untuk menentukan perpustakaan yang akan dijadikan tempat penelitian, dengan menggunakan metode purposive sampling dalam mengambil sampel atau pemilihan kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno Hadi, 1991:82). Berhubung di Jember banyak terdapat perpustakaan, berdasarkan populasinya ada beberapa perpustakaan

yaitu: (1) perpustakaan Pusat Universitas Jember, (2) koleksi buku-buku Fakultas Sastra Universitas Jember, (3) laboratrium Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember, (4) perpustakaan umum Daerah Jawa Timur Kabupaten Jember, (5) perpustakaan IKIP PGRI Jember, (6) perpustakaan Puspenmas Kabupaten Jember dan masih banyak yang lainnya. Penentuan perpustakaan sebagai tempat penelitian dilakukan dengan sengaja berdasarkan informasi sebelumnya bahwa tempat-tempat tersebut menyediakan sumber-sumber yang dapat untuk memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis.

Adapun perpustakaan yang dijadikan tempat penelitian adalah: (1) perpustakaan Pusat Universitas Jember, (2) koleksi buku-buku Fakultas Sastra Universitas Jember, (3) laboratrium Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Penulis menentukan daerah penelitian sebagaimana tersebut di atas, karena sudah memahami prosedur serta telah mengenal petugasnya dengan baik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data adalah pendapat-pendapat para ahli mengenai suatu fakta. Sedangkan fakta adalah intisari dari berbagai sumber. Jadi dapat dikatakan bahwa data yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan pendapat-pandapat para ahli sejarah mengenai suatu fakta sejarah. Maksud dari fakta sejarah adalah intisari dari sumber-sumber sejarah (Moh. Ali, 1985:18). Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka metode pengukuran datanya menggunakan metode dokumenter. Menurut pendapat Suharsini Arikunto, yang dimaksud dengan metode dokumenter adalah metode penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai datanya. Hadari Nawawi mengungkapkan bahwa metode dokumenter adalah cara pengumpulan data dari peninggalan tertulis terutama berupa arsip, teori-teori hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (1991:133). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

metode dokumenter adalah suatu penelitian yang menggunakan sumber data berupa buku-buku, majalah-majalah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Seperti yang dijelaskan dalam langkah heuristik, bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter. Jenis yang dipilih adalah sumber sekunder, karena sumber primer tidak dapat diperoleh. Sumber sekunder dapat dipakai apabila sumber primer tidak dapat diperoleh (Winarno Surakhmad, 1982:134). Sumber bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber informasi dokumenter yang bersifat sekunder yaitu, berfungsi memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya (Kartini Kartono, 1991:73). Meskipun sumber-sumber yang digunakan bersifat sekunder tetapi dalam pemakaiannya telah diseleksi sehingga kebenarannya tidak kalah dengan sumber primer. Berdasarkan uraian diatas, penulis menghimpun sumber berupa buku-buku serta majalah-majalah yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan yang telah disebutkan di depan maupun buku-buku yang menjadi koleksi penulis.

3.5 Metode Analisa Data

Analisa data adalah usaha untuk mengumpulkan kembali, merangkaikan dan menghubungkan fakta dan data yang bercerai berai untuk kemudian diinterpretasikan, sehingga menghasilkan kisah sejarah atau cerita sejarah dalam bentuk tulisan. Langkah menganalisis data sejarah ini berkaitan dengan langkah kritik dan interpretasi.

Metode yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode metode filosofik dengan logika induktif dan komparatif. Menurut Hadari Nawawi, metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berpikir induktif dan memperhatikan hukum-hukum berpikir

dengan logis (1991:62). Metode filosofik ini bekerja dengan data kualitatif, sehingga pemecahan masalah atau pengujian hipotesisnya secara umum bersifat apriori artinya berdasarkan kenyataan dan dapat diterima akal.

Metode filosofik dalam penelitian ini adalah suatu cara atau tehnik yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan secara rasional dengan menggunakan cara berpikir yang terarah menurut aturan-aturan penalaran yang tepat untuk mencapai kebenaran. Adapun dalam menerapkan metode filosofik ini menggunakan logika induktif dan logika komparatif.

3.5.1 Logika Induktif

Menurut Sutrisno Nadi, pengertian induktif adalah cara berpikir sintetik berlandaskan pada pengetahuan khusus, fakta-fakta yang unik dan merangkaikan fakta-fakta yang khusus menjadi pemecahan masalah yang bersifat umum (1986:18). Sedangkan menurut pendapat Hadari Nawawi, metode induktif atau berpikir sintetik adalah cara berpikir dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum (1990:18).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pengertian tehnik logika induktif adalah suatu tehnik yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan atau konklusi yang bersifat umum dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus.

3.5.2 Logika Komparatif

Pengertian komparatif adalah cara membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai sumber dan pendapat untuk mencari data dan fakta atau situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu (Moh. Ali, 1985:125). Menurut pendapat Winarno Surakhmad studi komparatif digunakan dalam suatu penelitian sejarah yaitu untuk

meneliti perhubungan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan suatu peristiwa (1982:36).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tehnik komparatif adalah cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa, hubungan suatu fenomena dengan fenomena lain dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan untuk mendapatkan fakta dari suatu peristiwa sejarah yang bisa dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang masuk akal.

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis data dengan menggunakan metode filosofik dengan logika induktif dan logika komparatif dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti dalam memecahkan masalah yang diselidiki secara rasional dan terarah dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena dan informasi atau data yang satu dengan lainnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari soal-soal yang khusus menuju konklusi yang bersifat umum. Sehingga dapat menghasilkan analisis yang logis, kronologis dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisa data adalah usaha untuk mengumpulkan data sejarah dengan jalan merangkaikan kembali, menghubungkan antara fakta-fakta sebagai hasil langkah kritik dan interpretasi, kemudian disusun menjadi kisah sejarah yang selaras dan bermakna secara sistematis, kronologis dan logis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan permasalahan, tinjauan kepustakaan dan pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa pemerintahan Republik Bataaf meliputi beberapa aspek yaitu:
 - a. aspek politik, dalam menjalankan eksploitasinya memeralat para raja beserta para Bupati dan aparat kerajaan untuk memeras dan menindas rakyat bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda.
 - b. aspek sosial, memudarnya kepercayaan rakyat kepada para pemimpin dan semakin menguatnya ikatan feodal yang sengaja dipelihara oleh Belanda sebagai suatu cara eksploitasi tenaga kerja.
 - c. aspek ekonomi, rakyat sebagai sumber produksi untuk dua kepentingan yaitu kepentingan raja dan pemerintah Belanda. Akibatnya kehidupan masyarakat bawah yaitu golongan petani semakin miskin dan sengsara, sedangkan golongan masyarakat atas yaitu para penguasa pribumi, kehidupan ekonominya semakin sejahtera dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Pihak Belanda sendiri kehidupannya semakin sejahtera karena adanya berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan dari para penguasa pribumi, untuk mengeksploitasi kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia.

5.2 Saran-saran

Agar hasil penelitian ini benar-benar memberikan manfaat seperti yang diharapkan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. bagi mahasiswa, calon guru sejarah hendaknya lebih menguasai materi sejarah sebagai bekal seorang guru sejarah profesional;
2. bagi sejarawan, hendaknya terus menggali data-data sejarah yang ada dan terus berusaha mengembangkan hasil-hasil penelitian yang belum sempurna, guna mengembangkan ilmu sejarah di masa mendatang;
3. bagi Alma mater, hendaknya terus mengembangkan pengadaan perpustakaan dan penelitian tentang sejarah Indonesia.

KEPUSTAKAAN

- A. Heuken S.J., 1988. **Eksiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila**. Yayasan Cipta Loka, Jakarta;
- Burger, D.H., 1962. **Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I** (terjemahan Prajudi Atmasudirja), Pradnya Paramita, Jakarta;*
- Beni Utoyo, 1961. **Sejarah Indonesia**. Usma, Yogyakarta;
- Cheppy Hari Cahyono, Suparlan Al Hakim, 1982. **Enksiklopedi Politika**. Usaha Nasional, Surabaya;
- C.S.T. Kansil dan Yulianto, 1988. **Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia**. Airlangga, Jakarta;
- Fuad Hasan, Koentjaraningrat, 1993. Beberapa azas Metodologi Alamiah, dalam Koentjaraningrat (Red), **Metode-metode Penelitian Masyarakat**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Gonggryp, 1961. **Sejarah Ekonomi Indonesia II**. (terjemahan Dharmono Hardjowidjono), Usma, Jakarta;*
- Graaf. D.E. H.J., 1989. **Terbunuhnya Kapten Tack: Kemelut di Kartasura abad XVII**. (terjemahan Dick Hartoko), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta;
- Gottschalk Louis, 1978. **Mengerti Sejarah**. (terjemahan Nugroho Notokusanto), UT Press, Jakarta;
- Hall. D.G.E., 1988. **Sejarah Asia Tenggara**. (terjemahan I.P Soewarsha), Usaha Nasional, Surabaya;
- Hadari Nawawi, 1991. **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- H. Hutauruk, 1952. **Tanahku Negeriku Sejarah Indonesia Sejak 1800**. Erlangga, Jakarta;*
- , 1984. **Gelora Nasionalisme Indonesia**. Erlangga, Jakarta;
- Hardi, 1988. **Menarik Pelajaran Dari Sejarah**. Haji Maaagung, Jakarta;
- Hanna. A. Willard, 1988. **Hikayat Jakarta**. (terjemahan Mien Joebhaar dan Ishak Zahir), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Hamid Hasan, dkk, 1986. **Sejarah Indonesia**. Karunia, Jakarta;
- I Nyoman Dekker, 1975. **Sejarah Indonesia Dalam Abad XIX. 1800-1900**. Lembaga Penerbitan Al mater YPTP IKIP, Malang;*
- I Gde Widja, 1988. **Dasar-dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah**. P2LPTK, Jakarta;
- Jonge De Hubb. 1989. **Agama Kebudayaan dan Ekonomi**. (terjemahan Suparmin), Rajawali Press, Jakarta;

- Kartini Kartono, 1990, Pengantar Metodologi Riset Sosial, C.V Mandar Maju, Bandung;
- Mohammad Ali, 1952, Pengantar Sejarah Feodal Indonesia Untuk Tenaga Sosial, Gansco, Bandung;*
- Mawarti Djoened Poesponegoro, 1988, Tokoh dan Peristiwa Dalam Sejarah Eropa Awal Maschi-1815, UI Press, Jakarta;
- Mardalis, 1990, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, P.T. Melton Putra, Jakarta;
- Miriam Budiardjo, 1988, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta;
- Mohammad Nazir, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Mohammad Yamin, 1956, Atlas Sejarah, Djambatan, Jakarta;
- Nagasumi, Akira, 1989, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 - 1918, Temprint, Jakarta;
- Neil, Robert Van, 1984, Munculnya Elit Modern Indonesia, (terjemahan Ny. Zahara Deliar Noer), Pustaka Jaya, Jakarta;
- Nugroho Notosusanto, 1971, Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah, Pusat Sejarah ~~ABRI-Depwaakan~~, Jakarta;
- Nugroho Notosusanto, Mawarti Djoened Poesponegoro, dkk, 1975, Sejarah Nasional Indonesia V, Depdikbud, Jakarta;*
- , 1978, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman), Yayasan Idayu, Jakarta;
- R.Z. Lerrisa, 1985, Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 - 1950 Terwujudnya Suatu Gagasan, Akademika Pressindo, Jakarta;*
- Ricklefs, M.C., 1992, Sejarah Indonesia Modern, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta;*
- Sartono Kartodirdjo, 1988, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium Jilid I, Gramedia, Jakarta;*
- , 1993, Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;*
- Slamet Muljana, 1980, Dari Holotan ke Jayakarta, Yayasan Idayu, Jakarta;
- , 1986, Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Inti Idayu Press, Jakarta;
- Sumardi Suryabrata, 1988, Metodologi Penelitian, C.V Rajawali, Jakarta;

- Soetrisno P.H., 1984, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta;
- Sutrieno Hadi, 1991, Metodologi Research Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta;
- Suhartono, 1994, Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 - 1945, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, Kamus Sosiologi, C.V Rajawali, Jakarta;*
- Suhartoyo Hardjosatoto, 1985, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah, Liberty, Yogyakarta;
- Sutraeno, 1975, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan (History and Science), Pradnya Paramita, Jakarta;
- Suharsini Arikunto, 1987, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta;
- Surianingrat Bayu, 1976, Pemerintahan dan Administrasi Desa, PT. Mekar Jaya, Bandung;
- Tatang M. Amiria, 1990, Menyusun Rencana Penelitian, C.V Rajawali press, Jakarta
- Tjokropranolo, 1992, Panglima Besar TNI Jendral Soedirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, Surya Pressindo, Jakarta;
- Winarno Surakhmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung;
- W.J.S. Poerwadarminta, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta;

Lampiran 1.

MATRIK PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	MASALAH dan SUB MASALAH PENELITIAN	SIFAT dan JENIS PENELITIAN	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN
1	2	3	4	5	6
Sejarah Indonesia Modern	Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Masa Republik Bataaf (1800-1811)	1. Bagaimana Kehidupan politik dan sosial ekonomi masyarakat Jawa pada masa republik Bataaf (1800-1811) ?	1. Jenis Penelitian Historik 2. Sifat : Studi kepustakaan / studi literatur	Sumber Pokok : 5 buah buku pokok Sumber Penunjang : 20 buah buku penunjang	1. Penerapan teori Purposive s 2. Pengumpulan Dokumenter 3. Metode Anal Menggunakan filosofik dan logika indukt logika kompa

INDONESIA DALAM ABAD KE-XVII-XVIII SAMPAI 1814

Mohammad Yamin, 1956:19, Atlas Sejarah, Djambatan, Jakarta:



Lampiran 3. :

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

UNIVERSITAS JEMBER

UPT. PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

Nomor : 344 / PT-32 - H16 / 912.0 1996

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : SRI ARINI

NIM : 9102105101

Mahasiswa : Univ. Jember FKIP/ Pendidikan Sejarah

Terhitung mulai Oktober sampai dengan September telah mengadakan Studi Literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	R. Sirkulasi	R. Referensi	R. Skripsi
30-10-1995	-	-	*
09-11-1995	-	*	-
20-11-1995	-	"	-
15-12-1995	"	-	-
06-01-1996	-	-	*
08-02-1996	*	*	-
05-03-1996	*	-	-
10-04-1996	-	*	-
30-05-1996	-	-	*
08-09-1996	*	*	-
17-09-1996	*	*	-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Oktober 1996

A.n Kepala,
Kusubag TU. Perpustakaan
Universitas Jember



Dra. Hudiwati S. SOS

NIP. 130 683 181

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N A M A : SRI ARINI
 NIM / JURUSAN / ANGKATAN : 9102105101/Pend. IPS/Pend. Sejarah
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Jatuhnya VOC Terhadap Kehidupan Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Pada Tahun 1799 - 1811.
 PEMBIMBING I : Dra. SRI HANDAYANI
 PEMBIMBING II :
 KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari, tanggal	Materi Konsultasi	Tt. Pembimbing
1.	Babu, 1-11-1995	Judul Penelitian	<u>Sh</u>
2.	Babu, 29-11-1995	Matrik	<u>Sh</u> <u>Sh</u>
3.	Selasa, 5-12-1995	Matrik	<u>Sh</u> <u>Sh</u>
4.	Senin, 20-5-1996	Bab I	<u>Sh</u> <u>Sh</u>
5.	Kamis, 30-5-1996	Bab I, Bab II	<u>Sh</u> <u>Sh</u>
6.	Senin, 26-8-1996	Bab W	<u>Sh</u> <u>Sh</u>
7.	Senin, 23-9-1996	Bab W, Bab V	<u>Sh</u> <u>Sh</u>
8.	Senin, 7-10-1996	Bab W, Bab Y	<u>Sh</u>
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

- CATATAN ; 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan ujian SKRIPSI.

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N a m a : SRI ARINI
 Nim / Jurusan / Angkatan : 9102105101/Pend. IPS/Pend. Sejarah
 Judul Skripsi : Pengaruh Jatuhnya VOC Terhadap Kehidupan
 Politik dan Sosial Ekonomi Masyarakat
 Jawa Pada Tahun 1799 - 1811.
 Pembimbing I :
 Pembimbing II : Drs. SUTJITRO
 KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Et. Pembimbing :
1.	Rabu, 1-11-1995	Judul Penelitian	
2.	Sabtu, 2-12-1995	Matrik	
3.	Rabu, 10-1-1996	Matrik	
4.	Kamis, 2-5-1996	Bab I	
5.	Sabtu, 6-5-1996	Bab I	
6.	Rabu, 8-5-1996	Bab I, Bab II	
7.	Kamis, 15-5-1996	Bab II, Bab III	
8.	Sabtu, 18-5-1996	Bab II, Bab III	
9.	Rabu, 4-8-1996	Bab W	
10.	Rabu, 21-8-1996	Bab W, Bab V	
11.	Sabtu, 24-8-1996	Bab W, Bab V	
12.			
13.			
14.			
15.			

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN
 S K R I P S I,-